LAPORAN RAKOR PENGENDALIAN TINGKAT OPD
PELAKSANAAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2021
BULAN JANUARI DI OPD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

I. DESKRIPSI PENYELENGGARAAN RAKOR

A. Waktu Penyelenggaraan Rakor

Selasa, 9 Februari 2021

B. Pimpinan Rakor

Kepala DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah

C. Peserta Rakor

1. Para Kepala Bidang
2. Para kepala Sub Bagian
3. Para Kepala Seksi
4. Pejabat Pengadaan barang dan jasa
5. Bendahara Pengeluaran, Bendahara pengeluaran pembantu, Bendahara Gaji, Verifikator anggaran di lingkungan Dinas Perempuan dan Anak.

D. Notulis

Pelaksana Sub Bagian Program

II. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN BULAN INI

A. Realisasi sampai dengan bulan ini

a. Fisik = 3,97 %

b.Keuangan = 780.400.916 (3,79%)

B. Kegiatan yang berdeviasi fisik

No	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi		Deviasi Fisik (%)	Ket
				Fisik (%)	Keuangan (Rp)		
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana							
PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH							
Administrasi Keuangan							
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.127.359.000			336.538.135		
1	Tambahan Penghasilan Pegawai	4.127.359.000	8,30	7,14	336.538.135	(1,16)	
Administrasi Umum							
	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	65.600.000			0		
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	51.100.000	5	0	0	(5)	menyesuaikan kebutuhan.
2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.500.000	4,20	0	0	(4,20)	menyesuaikan kebutuhan.
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan							
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN							

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi							
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	55.932.000			0		
1	Pengawasan kinerja penyelenggara perlindungan bagi korban kekerasan	55.932.000	1,60	0	0	(1,60)	Pada bulan januari banyak korban yang membutuhkan penanganan , sehingga realisasi melebihi taget yang ditetapkan, karena kegiatan layanan tidak dapat diprediksi kebutuhannya.
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak							
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA							
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi							
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	10.210.000			2.420.000		
1	Identifikasi, Koordinasi dan Penjangkauan Kelompok Keluarga Rentan	10.210.000	23,70	9,92	2.420.000	(13,78)	
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK							
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi							
	Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	196.579.000			13.500.000		
1	Penyediaan Layanan Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Anak	196.579.000	6,87	5,04	13.500.000	(1,83)	
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat							
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK							
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi							

	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	206.120.000			0		
1	Penyusunan dokumen profil perempuan, profil anak, isu perempuan, isu anak dan analisis kekerasan	206.120.000	3,43	3,42	0	(0,01)	

Jumlah SSK dengan Deviasi Fisik Negatid s/d Bulan ini :	7	0	0			

Jumlah SSK dengan Anggaran yang di 0 kan :	21	0	0			

III. PERMASALAHAN DAN HAMBATAN SERTA UPAYA PENYELESAIANNYA

Permasalahan

Pada bulan Januari terdapat 6 kegiatan yang mengalami deviasi antara lain :

1. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN terdapat 1 SSK yang berdeviasi negatif, yaituÂ Tambahan Penghasilan Pegawai dikarenakan banyak kekosongan pada pejabat struktural di lingkungan dinas perempuan dan anak.
2. Kegiatan Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, terdapat 2 SSK yang berdeviasi negatif, yaitu Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dikarenakan menyesuaikan kebutuhan, selama Pandemi Undangan rapat by virtual semua (daring).
3. Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota, terdapat 1 SSK yang berdeviasi negatif yaitu Pengawasan kinerja penyelenggara perlindungan bagi korban kekerasan dikarenakan Pada bulan januari banyak korban yang membutuhkan penanganan , sehingga realisasi melebihi taget yang ditetapkan, karena kegiatan layanan tidak dapat diprediksi kebutuhannya.
4. Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota, terdapat 1 SSK yang berdeviasi negatif yaitu Identifikasi, Koordinasi dan Penjangkauan Kelompok Keluarga Rentan dikarenakan menyesuaikan kebutuhan.
5. Kegiatan Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi, terdapat 1 SSK yang berdeviasi negatif yaitu Penyediaan Layanan Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Anak dikarenakan menyesuaikan kebutuhan.
6. Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi,Â terdapat 1 SSK yang berdeviasi negatif yaitu Penyusunan dokumen profil perempuan, profil anak, isu perempuan, isu anak dan analisis kekerasan dikarenakan menyesuaikan kebutuhan.

Upaya

Upaya mengatasi deviasi pada bulan januari yaitu pada bulan selanjutnya untuk dapat memaksimalkan kegiatan, sehingga dapat terlaksana sesuai dengan awal perencanaan (eRKO)

IV. RENCANA KERJA BULAN BERJALAN

Rencana Kegiatan di Bulan Februari sebagai berikut:

Sekretariat

1. Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
2. Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
6. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
8. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
11. Penyediaan Makanan dan Minuman
12. Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Bidang Kualitas Hidup Perlindungan Perempuan

1. Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi.
2. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan ekonomi pada Organisasi kemasyarakatan kewenangan Provinsi.
3. Kegiatan Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah Provinsi dan lintas daerah Kab/Kota.
4. Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/KotaPenguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota.
5. Kegiatan Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Provinsi.
6. Kegiatan Kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak kewenangan Provinsi.

Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

1. Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi.
2. Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintahan, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
3. Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan koordinasi Tingkat Daerah Provinsi
4. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota.

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera

1. Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk cakupan darah Provinsi
2. Kegiatan Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan KIE

1. Kegiatan Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal

Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat

1. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi.
2. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi.
3. Kegiatan Pengumpulan, Pengelolaan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah Provinsi.
4. Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi

V. PENUTUP

Kesimpulan rapat koordinasi pengendalian di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan kegiatan tahun 2021 diminta para Kabid/ Kasi/Kasubbag agar mencermati e-RKO sesuai Kertas Kerja masing-masing dan DPA masing-masing, serta pelaksanaan kegiatan waktu nya jangan di akhir bulan.
2. Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, PPKom agar berkoordinasi dengan pejabat pengadaan barang/jasa guna kelancaran pelaksanaannya (kontrak konsolidasi ATK masih proses).
3. PPTK setiap selesai melakukan kegiatan segera mempertanggungjawabkan (SPJ), kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu, paling lama 15 hari kerja setelah uang muka kerja/panjer diterima dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada PA/KPA.

Demikian laporan pelaksanaan rapat koordinasi pengendalian pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah bulan Januari 2021, untuk menjadikan periksa

Semarang, Selasa, 9 Februari 2021

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PERREMPUAN, PERLIDNUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELAURAGA BERENCANA

PEMERINTAH PROVINSI DINAS PEREMPUAN DAN ANAK JAWA TENGAH

Dra. RETNO SUDEWI, Apt.MSi,MM
NIP. 196811241993102001